

Katalog: 9302020.64

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran 2012 - 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran 2012 - 2016



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**

ISSN : 1907 - 1876

Nomor Publikasi : 64550.1703

Katalog BPS : 9302020.64

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 88 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Desain Kover:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dicetak Oleh:

CV. Mahendra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tim Penyusun

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran 2012-2016

Pengarah :

M. Habibullah S.Si, M.Si

Editor :

Wembri Suska SST., M.Si

Penulis :

Dr. Yusniar Juliana S.Si, MIDEK
Nindia Indri Dirmayanti, SST

Pengolah data :

Nindia Indri Dirmayanti, SST

Desain/Layout :

Nindia Indri Dirmayanti, SST
Tamami Ikhwan, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir Provinsi Kalimantan Timur (**tanpa Provinsi Kalimantan Utara**). Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Samarinda, Juli 2017

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Kalimantan Timur,



M. HABIBULLAH, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	5
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	24
2.6 Ekspor dan Impor	28
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2012-2016	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kaltim Menurut Pengeluaran	34
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	41

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	46
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	47
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	51
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	53
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	55
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	57
3.9 Perkembangan Ekspor Neto Antar Daerah	59
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGELUARAN, 2012-2016	61
4.1 PDRB (Nominal)	63
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	65
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	66
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	67
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	68
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	69
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	70
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	72
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	74
BAB V PENUTUP.....	75
LAMPIRAN	79
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012-2016	35
Tabel 2. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012-2016	36
Tabel 3. Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur ADHB Menurut Pengeluaran, 2012—2016	38
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2012—2016.....	39
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran, 2012- 2016	40
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016	41
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016.....	42
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016	44
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016	44
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016	46
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2012 - 2016.....	47

Tabel 12.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016.....	48
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016	51
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016.....	53
Tabel 15.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016.....	55
Tabel 16.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016.....	57
Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016.....	63
Tabel 18.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2012—2016	65
Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2012—2016	66
Tabel 20.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016	67
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2012—2016	68
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Kalimantan Timur 2012—2016	69
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016.....	70
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016 ..	72
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016.....	74

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB Provinsi Kalimantan Timur adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012 – 2016	37

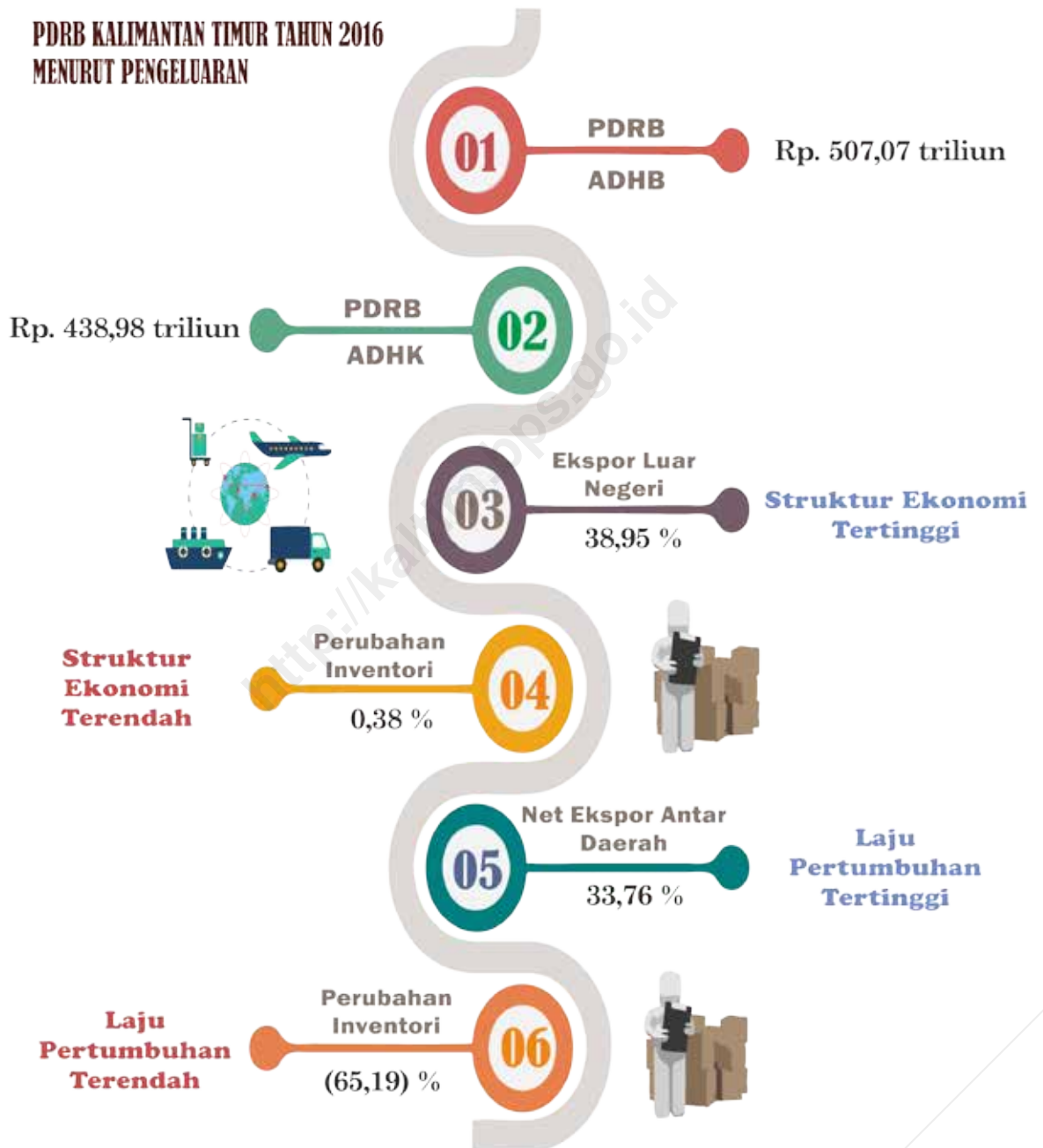
<http://kaltim.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran	81
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran	81
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran.....	82
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran.....	82
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran.....	83
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran.....	83
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran.....	84
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran.....	84
Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran, (2010 = 100).....	85
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran, (2010 = 100)	85

BAB I PENDAHULUAN

PDRB KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 MENURUT PENGELUARAN



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku, atau disebut PDRB ADHB, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,** PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran akhir konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan dari faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

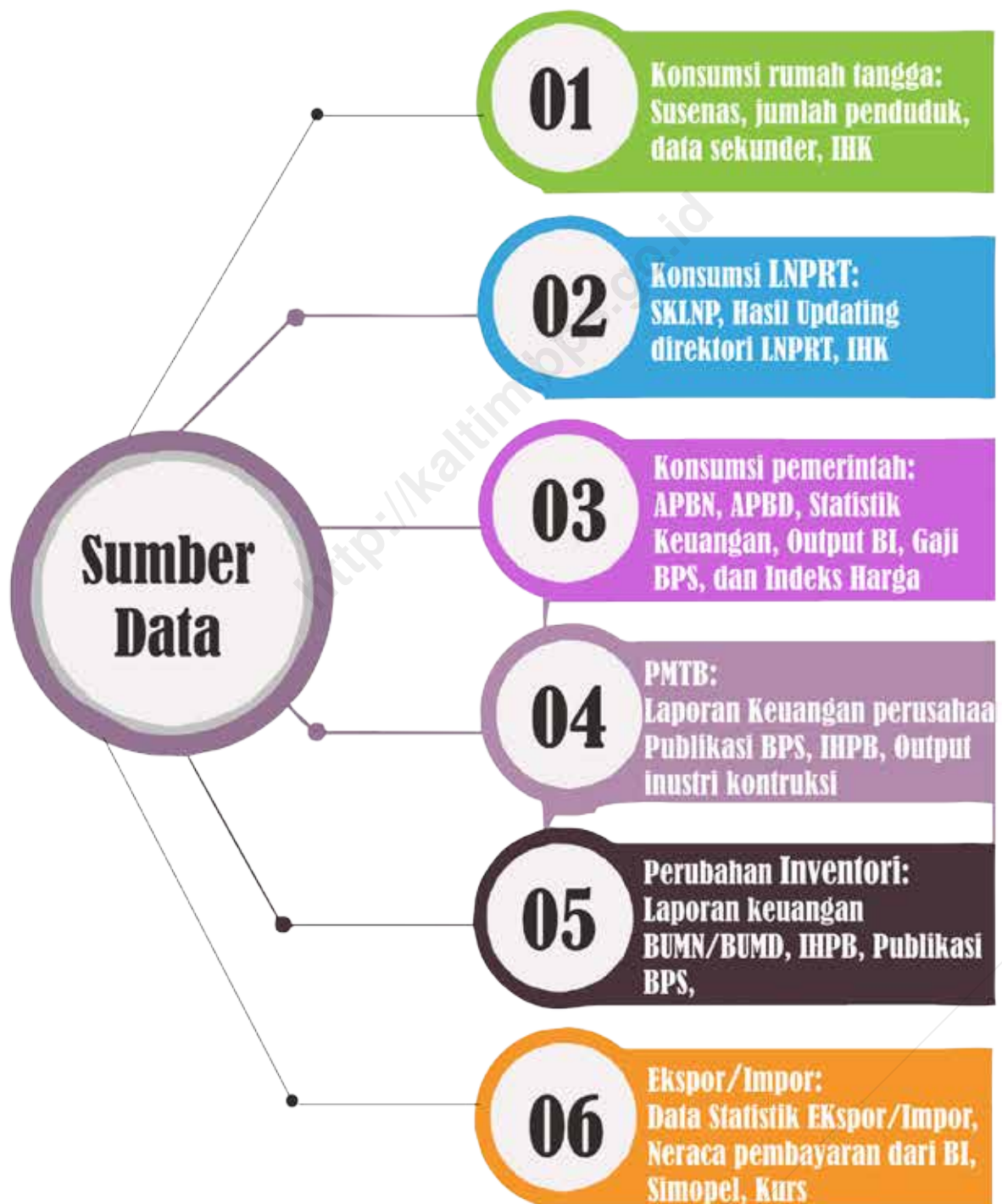
1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara/wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara/wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara/wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran, yaitu lebih dari 15 persen. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (tidak diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PK-RT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PK-RT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-RT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-RT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PK-RT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP ;
4. Diperoleh nilai PK-RT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dengan 7 kelompok COICOP;
6. PK-RT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

<http://kaltim.bps.go.id>

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/

hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasartersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Ø Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Ø Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Ø Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya

diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \cdot N_i$$

X : PK-LNPRT adh berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar-penjualan barangdan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi atas dasar harga konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

<http://kaltim.bps.go.id>

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang

bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai

tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di “*deflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk PMTB atas dasar harga konstan, diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjenak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflatae perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Ekspor Neto antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang - PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai Pemberitahuan Impor Barang - PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan “ekspor neto antar wilayah” merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

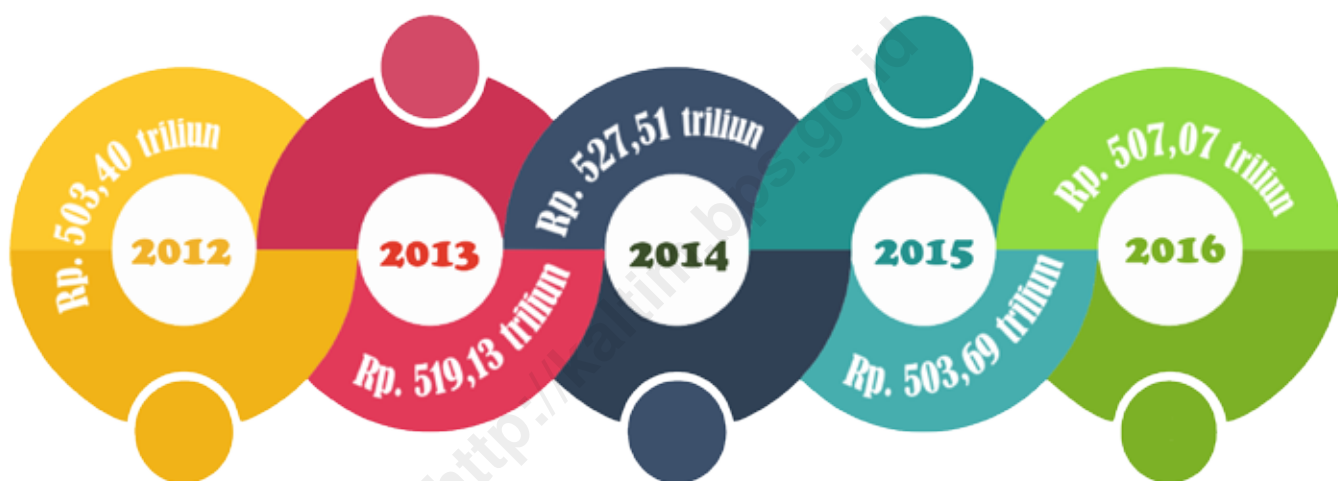
BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

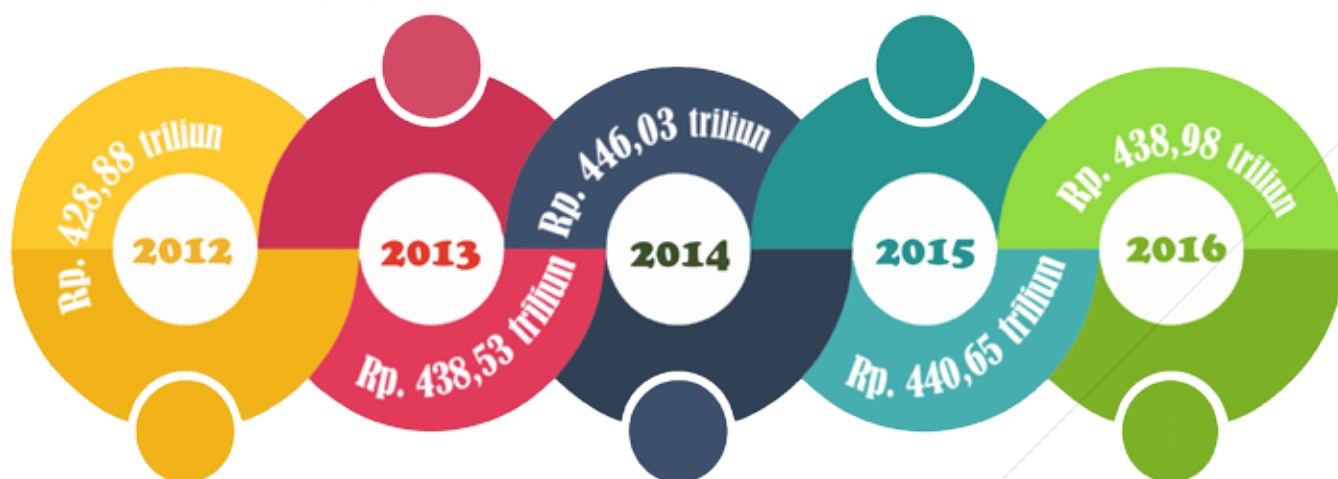
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

2012-2016

PDRB ADHB



PDRB ADHK 2010



Pada tahun 2016, ekonomi global mengalami perlambatan. Setelah tumbuh positif di tahun 2015 sebesar 2,73 persen, besaran pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,44 persen di tahun 2016. Perlambatan tersebut mengakibatkan menurunnya permintaan global atas komoditas bahan bakar minyak dan beberapa produk pertanian. Beberapa negara yang mengalami perlambatan merupakan partner dagang dan pangsa ekspor Indonesia, seperti Jepang, Cina, Amerika, India dan Korea. Harga beberapa komoditas penyumbang 45 persen nilai ekspor Indonesia, yaitu komoditas minyak sawit, batubara, gas alam, dan minyak mentah, sudah mengalami peningkatan. Namun demikian, besaran peningkatan harga tersebut belum mampu memulihkan kondisi ke tingkat harga tertinggi sebelumnya.

Ditengah perlambatan ekonomi global tersebut, perekonomian Indonesia mampu mengalami percepatan. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,88 persen, sedangkan di tahun 2016 ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 5,02 persen. Percepatan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat seperti yang dirangkum dalam laporan survei ekonomi yang dikeluarkan oleh OECD (2016).

Berbagai reformasi kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, diantaranya adalah mengurangi hambatan bisnis dan mengembangkan aturan investasi. Pada bidang anggaran, Pemerintah Pusat melakukan pengalihan anggaran dari penggunaan untuk subsidi menjadi alokasi untuk jaminan sosial, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan lainnya terkait anggaran adalah dengan melakukan efisiensi belanja di seluruh level pemerintahan. Sementara itu, Pemerintah juga melakukan rasionalisasi aturan investasi asing.

Namun demikian, bagi Kalimantan Timur yang sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan serta memiliki keterkaitan erat dengan pasar luar negeri, pengaruh perlambatan dari ekonomi global sangat berdampak terhadap kinerja ekonomi wilayah. Seiring dengan melemahnya ekonomi partner dagang luar negeri Kalimantan Timur, seperti Jepang dan Cina, maka permintaan akan produk andalan wilayah Kalimantan Timur, seperti batu bara dan kelapa sawit, menjadi berkurang. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi di tahun 2016, dimana ekonomi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan sebesar negatif 0,38 persen.

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGELUARAN

Walaupun mengalami perlambatan, kondisi perekonomian global mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 2,44 persen di tahun 2016. Hal ini membawa pengaruh positif pada situasi perekonomian di Indonesia yang juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,02 persen pada periode yang sama. Kinerja ekonomi yang positif tersebut ditandai dengan mulai meningkatnya beberapa harga komoditas dunia yang juga dihasilkan Indonesia. Harga minyak mentah Indonesia hingga bulan Desember 2016 berdasarkan perhitungan Formula ICP (*Indonesia Crude Price*) meningkat menjadi US\$ 51,65 per barel dari sebesar US\$ 37,68 per barel pada Desember 2015. Sedangkan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan langsung (*spot*) yang berlaku tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2016 pada titik serah penjualan secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*FOB vessel*) adalah US\$ 54,70/Ton, sebagaimana dirilis dalam portal www.minerba.esdm.go.id. Rata-rata HBA 2016 tersebut naik dibandingkan dengan rata-rata HBA 2015 (US\$ US\$ 53,29/ton), sebesar 1,41/ton atau meningkat sebesar 2,65 persen.

Dengan perekonomian Kalimantan Timur yang masih banyak mengandalkan komoditas sumber daya alam (SDA), peningkatan harga komoditas global seharusnya mampu mendorong kinerja ekonomi wilayah. Namun demikian, setelah mengalami penurunan harga komoditas yang cukup signifikan pada periode sebelumnya, peningkatan harga-harga tersebut belum mampu memulihkan kondisi perekonomian untuk dapat tumbuh positif. Neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Timur meskipun masih surplus, tetapi mengalami penurunan sebesar Rp. 35,87 triliun jika dibandingkan tahun 2015 (atas dasar harga berlaku). Hal ini terjadi karena penurunan ekspor luar negeri lebih besar dibandingkan penurunan impor, yang juga disertai dengan melemahnya permintaan domestik dan depresiasi rupiah.

Perlambatan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah mendorong munculnya resiko korporasi berupa penurunan kinerja korporasi, yang pada gilirannya mendorong penurunan investasi. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di Kalimantan Timur pada tahun 2016 berkontraksi (tumbuh negatif) sebesar 6,91 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang terendah sejak tahun 2011. Penurunan kinerja korporasi ini juga berdampak pada kemampuan korporasi membayar pajak yang semakin menurun, akibatnya penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak juga menurun. Hal ini menyebabkan penurunan kemampuan fiskal pemerintah yang akhirnya berimplikasi pada menurunnya konsumsi

pemerintah, hingga terjadi kontraksi sebesar 10,00 persen. Pada komponen rumah tangga, penurunan tingkat pendapatan masyarakat mengakibatkan terjadinya perlambatan konsumsi rumah tangga tahun 2016. Pada tahun 2015, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adalah sebesar 1,28 persen, sementara itu pada tahun 2016 hanya sebesar 0,60 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 2,81 persen, besaran pertumbuhan konsumsi tersebut jauh lebih rendah.

Tabel 1. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65.493,37	73.396,42	80.180,29	86.563,22	90.750,79
2. Konsumsi LNPRT	1.301,07	1.766,36	2.090,68	2.460,19	2.439,03
3. Konsumsi Pemerintah	17.342,81	20.281,62	23.523,17	25.079,72	24.143,52
4. PMTB	124.671,83	129.083,65	139.830,35	145.766,48	144.794,38
5. Perubahan Inventori	8.232,43	9.842,94	12.344,42	5.771,87	1.922,89
6. Ekspor ^{*)}	539.032,80	554.654,65	557.058,22	539.801,76	550.077,25
7. Impor ^{*)}	252.672,28	269.893,77	287.511,88	301.752,13	307.054,09
Total PDRB	503.402,03	519.131,87	527.515,26	503.691,11	507.073,76

**) Ekspor/impor luar negeri ditambah ekspor/impor antar daerah*

Nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode tahun 2012-2014 menunjukkan tren peningkatan, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan dan kemudian kembali meningkat di tahun 2016. Nilai nominal PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 mencapai Rp. 507,1 triliun atau meningkat sebesar Rp. 3,38 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan pada nilai net ekspor (ekspor luar negeri dan ekspor antar daerah dikurang impor luar negeri dan impor antar daerah). Peningkatan nilai ekspor total lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan impor Kalimantan Timur. Peningkatan aktivitas impor Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebesar Rp. 5,30 triliun, sedangkan aktivitas ekspor meningkat sebesar Rp. 10,27 triliun.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan

volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2012–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kalimantan Timur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58.004,00	61.025,60	63.242,82	64.054,14	64.441,62
2. Konsumsi LNPRT	1.173,39	1.473,88	1.634,57	1.770,23	1.698,70
3. Konsumsi Pemerintah	15.971,39	17.532,58	17.562,26	16.197,10	14.578,01
4. PMTB	110.334,68	111.846,99	117.106,16	115.380,24	107.405,55
5. Perubahan Inventori	5.510,75	4.512,59	5.836,97	3.742,19	1.302,84
6. Ekspor ^{*)}	454.195,06	467.041,12	475.151,61	473.552,43	482.790,89
7. Impor ^{*)}	216.311,55	224.899,85	234.505,33	234.048,63	233.240,57
Total PDRB	428.877,71	438.532,91	446.029,05	440.647,70	438.977,04

**) Ekspor/impor luar negeri ditambah ekspor/impor antar daerah*

Grafik 1 menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Provinsi Kalimantan Timur adh berlaku dan adh konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012 – 2016



Sebagai salah satu daerah utama penghasil batubara, minyak mentah dan gas alam, peran komponen ekspor sangat dominan dalam struktur PDRB Pengeluaran Kalimantan Timur dengan besaran yang lebih tinggi dari nilai impornya. Hal ini menyebabkan neraca perdagangan Kalimantan Timur mengalami surplus, meskipun cenderung menurun setiap tahunnya. Peran ekspor neto (ekspor dikurangi impor) pada perekonomian Kalimantan Timur tahun 2012 sekitar 56,89 persen, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 47,93 persen di tahun 2016 (peran ekspor 108,48 persen terhadap PDRB dikurangi peran impor sebesar 60,55 persen). Jika dirinci menurut tujuan ekspor dan asal impor, ekspor dan impor Kalimantan Timur sebagian besar atau sekitar 60 hingga 80 persen merupakan impor antar daerah.

Seiring dengan menurunnya peran ekspor neto terhadap total PDRB Kalimantan Timur, peran dari komponen lain menjadi meningkat. Dengan penduduk sekitar 3,20 juta jiwa pada tahun 2012 dan terus meningkat hingga mencapai 3,50 juta jiwa pada tahun 2016 (pertumbuhan penduduk 2016 sekitar 2,81 persen per tahun) mengakibatkan semakin besarnya peranan konsumsi dalam pembentukan PDRB. Pada tahun 2012, peran komponen konsumsi rumah tangga sekitar 13,01 persen terhadap total PDRB, sementara itu di tahun 2016 besaran peranan komponen tersebut mencapai 17,90 persen. Demikian juga dengan komponen lainnya, yaitu konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT), mengalami peningkatan peranan dari 0,26 persen pada tahun 2012 menjadi 0,48 persen di tahun 2016. Selain konsumsi rumah tangga dan LNPRT, komponen konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan peranan. Pada tahun 2012, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap total PDRB sebesar 3,45 persen, sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi 4,76 persen. Sementara itu, porsi PMTB dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur adalah sebesar 24,77 persen di tahun 2015, kemudian menjadi 28,55 persen di tahun 2016.

Besaran komponen PMTB merupakan gambaran aktivitas investasi di suatu wilayah. Kontribusi PMTB yang cukup tinggi mengindikasikan pentingnya peranan investasi dalam menggerakkan perekonomian daerah. Peningkatan investasi diharapkan dapat menciptakan efek pengganda dalam perekonomian wilayah serta mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi. Selain itu, kegiatan investasi juga diharapkan dapat mendorong berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah serta terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi diyakini mampu mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini tentunya akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumber daya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Peran investasi sudah cukup dominan di Kalimantan Timur, tetapi perlu terus ditingkatkan nilainya dan ditambah variasinya ke sektor non sumber daya alam seperti pariwisata, pengolahan lebih lanjut terhadap minyak kelapa sawit, pusat pembangkit listrik, dan lain-lain. Dominasi tersebut ditunjukkan oleh kontribusi PMTB terhadap total PDRB yang mencapai lebih dari 28 persen pada tahun 2016. Gambaran positif dari peranan investasi juga ditunjukkan oleh kecenderungan peningkatan kontribusi PMTB terhadap total PDRB sepanjang periode 2012 - 2016.

Tabel 3. Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur ADHB Menurut Pengeluaran, 2012—2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13,01	14,14	15,20	17,19	17,90
2. Konsumsi LNPR	0,26	0,34	0,40	0,49	0,48
3. Konsumsi Pemerintah	3,45	3,91	4,46	4,98	4,76
4. PMTB	24,77	24,87	26,51	28,94	28,55
5. Perubahan Inventori	1,64	1,90	2,34	1,15	0,38
6. Ekspor ^{*)}	107,08	106,84	105,60	107,17	108,48

7. Impor ^{*)}	50,19	51,99	54,50	59,91	60,55
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**) Ekspor/impor luar negeri ditambah ekspor/impor antar daerah*

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2016 masih mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2012, ekonomi Kalimantan Timur mampu tumbuh sebesar 5,26 persen dan kemudian mengalami perlambatan hingga tahun 2014 sebesar 1,71 persen. Pada tahun 2015 dan 2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi, atau tumbuh negatif, masing-masing sebesar 1,21 persen dan 0,38 persen.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2012—2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,00	5,21	3,63	1,28	0,60
2. Konsumsi LNPRT	4,95	25,61	10,90	8,30	(4,04)
3. Konsumsi Pemerintah	6,83	9,77	0,17	(7,77)	(10,00)
4. PMTB	4,59	1,37	4,70	(1,47)	(6,91)
5. Perubahan Inventori	54,53	(18,11)	29,35	(35,89)	(65,19)
6. Ekspor ^{*)}	5,54	2,83	1,74	(0,34)	1,95
7. Impor ^{*)}	7,21	3,97	4,27	(0,19)	(0,35)
Total PDRB	5,26	2,25	1,71	(1,21)	(0,38)

**) Ekspor/impor luar negeri ditambah ekspor/impor antar daerah*

Dilihat menurut komponen pembentuknya, struktur ekonomi Kalimantan Timur sampai saat ini masih didominasi oleh ekspor komoditas primer, seperti batubara dan migas. Ekspor komoditi ini memiliki nilai tambah yang rendah, rentan terhadap pergerakan harga komoditas global, dan permintaannya cenderung terkonsentrasi pada beberapa negara tertentu yang sedang berkembang, seperti Tiongkok dan India, selain Jepang dan Korea. Pada tahun 2016, pertumbuhan komponen ekspor ini tumbuh sebesar 1,95 persen.

Melemahnya harga komoditas ekspor, serta turunnya kemampuan pemerintah dalam berinvestasi di Kalimantan Timur telah menjadikan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) daerah ini juga berkontraksi sebesar 6,91 persen pada tahun 2016. Besaran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2015 yang juga berkontraksi, sebesar 1,47 persen. Turunnya kemampuan fiskal pemerintah akibat rendahnya penerimaan pemerintah dari pajak dan dana bagi

hasil, mengakibatkan konsumsi pemerintah pun ikut berkontraksi sebesar 10,00 persen. Sebagai dampak turunnya konsumsi domestik dan investasi ini, pertumbuhan impor pun mengalami kontraksi sebesar 0,35 persen pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, pertumbuhan positif masih dialami oleh komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor. Namun demikian, dalam kurun dua tahun tersebut terdapat perbedaan kinerja pada kedua komponen PDRB. Di tahun 2015, komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,28 persen, sedangkan komponen ekspor pada tahun 2015 mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen. Namun pada tahun 2016, konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan, dimana komponen tersebut hanya mampu tumbuh sebesar 0,60 persen. Sementara itu, kinerja ekspor meningkat, dimana komponen tersebut tumbuh positif sebesar 1,95 persen.

Secara total, indeks implisit PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016, indeks implisit total PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah 115,51 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 114,31. Dari tabel 5 tampak bahwa hampir seluruh indeks implisit komponen pengeluaran mengalami peningkatan kecuali indeks implisit komponen ekspor.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran, 2012 - 2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	112,91	120,27	126,78	135,14	140,83
2. Konsumsi LNPR	110,88	119,84	127,90	138,98	143,58
3. Konsumsi Pemerintah	108,59	115,68	133,94	154,84	165,62
4. PMTB	112,99	115,41	119,40	126,34	134,81
5. Perubahan Inventori	149,39	218,12	211,49	154,24	147,59
6. Ekspor	118,68	118,76	117,24	113,99	113,94
7. Impor	116,81	120,01	122,60	128,93	131,65
Total PDRB	117,38	118,38	118,27	114,31	115,51

*) Ekspor/impor luar negeri ditambah ekspor/impor antar daerah

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Komponen konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar keempat pada PDRB Kalimantan Timur. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 0,60 persen. Sejak tahun 2012, konsumsi rumah tangga terus mengalami perlambatan. Tren perlambatan terutama terjadi pada konsumsi yang bersifat barang sekunder dan tersier, yang tergolong dalam kelompok konsumsi non makanan. Pada tahun 2012, komponen ini mampu tumbuh sebesar 8,00 persen, namun kemudian melambat di tahun 2013 (5,21 persen) dan berlanjut pada periode berikutnya hingga pada tahun 2016 hanya dapat tumbuh sebesar 0,60 persen.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	65.493,37	73.396,42	80.180,29	86.563,22	90.750,79
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	58.004,00	61.025,60	63.242,82	64.054,14	64.441,62
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	13,01	14,14	15,20	17,19	17,90
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	20.468,60	22.405,65	23.924,42	25.262,13	25.919,69
b. ADHK 2010	18.127,95	18.629,22	18.870,57	18.693,20	18.405,42
Pertumbuhan ¹ (<i>Persen</i>)					
a. Total konsumsi RT	8,00	5,21	3,63	1,28	0,60
b. Perkapita	5,42	2,77	1,30	(0,94)	(1,54)
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	3.199,70	3.275,80	3.351,40	3.426,60	3.501,23

Jika dilihat berdasarkan nilai nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga riil konstan), besaran konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan besaran nilai ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dan peningkatan harga barang dan jasa yang dikonsumsi, namun dengan kecepatan yang berbeda. Adanya peningkatan konsumsi rumah tangga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar Rp. 65,49 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp. 90,75 triliun pada tahun 2016. Peningkatan nilai konsumsi rumah tangga tersebut mengindikasikan adanya pergeseran peran antar komponen dalam penciptaan nilai tambah wilayah. Seiring dengan menurunnya peran net ekspor dalam perekonomian Kalimantan Timur tiap tahunnya, peran konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, kontribusi konsumsi rumah tangga dalam penciptaan nilai tambah sekitar 13,01 persen, pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 17,90 persen di tahun 2016.

Nilai konsumsi rumah tangga per kapita atas dasar harga berlaku juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, rata-rata setiap penduduk di Kalimantan Timur menghabiskan dana sekitar 20.468,60 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb.). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 22.405,65 ribu rupiah di tahun 2013, dan berlanjut di tahun 2014 menjadi sebesar 23.924,42 ribu rupiah. Pada tahun 2015, besaran nilai konsumsi rumah tangga juga meningkat menjadi sebesar 25.262,13 ribu rupiah, kemudian meningkat tipis di tahun 2016 menjadi sebesar 25.919,69 ribu rupiah.

Rata-rata konsumsi per kapita atas dasar harga konstan 2010 mengalami perlambatan sejak tahun 2013 dan mengalami kontraksi sejak tahun 2015. Konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 5,42 persen, kemudian di tahun 2013 melambat menjadi sebesar 2,77 persen. Perlambatan berlanjut di tahun 2014 dimana pertumbuhan konsumsi per kapita hanya sebesar 1,30 persen. Akibat pertumbuhan penduduk serta tingkat harga yang lebih cepat dibandingkan dengan besaran pertumbuhan nilai konsumsi rumah tangga, maka di tahun 2015 rata-rata konsumsi per kapita mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, serta berlanjut turun di tahun 2016 sebesar 1,54 persen.

Berdasarkan struktur konsumsi rumah tangga, terlihat bahwa pada tahun 2016 alokasi belanja rumah tangga sebagian besar digunakan untuk mengkonsumsi komoditi makanan, minuman dan rokok, yakni sebesar 37,64 persen. Konsumsi komoditi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga merupakan terbesar kedua yakni sekitar 17,30 persen. Selanjutnya, 16,86 persen dari total konsumsi rumah tangga adalah untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya dan sebesar 12,14 persen untuk konsumsi untuk hotel dan restoran. Proporsi konsumsi kesehatan dan pendidikan sebesar 8,61 persen dari total konsumsi rumah tangga, sedangkan proporsi konsumsi pakaian dan alas kaki hanya sebesar 2,59 persen saja.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016²

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,81	34,97	34,43	35,66	37,64
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,98	2,88	2,77	2,86	2,59
c. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	18,23	17,88	17,90	18,06	17,30
d. Kesehatan & Pendidikan	8,85	8,80	9,01	8,76	8,61
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,57	18,39	18,67	17,21	16,86
f. Hotel & Restoran	11,06	11,78	12,06	12,51	12,14
g. Lainnya	5,50	5,30	5,17	4,93	4,85
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan struktur konsumsi rumah tangga, terlihat bahwa peran konsumsi makanan (kelompok makanan, minuman & rokok serta kelompok restoran) mengalami peningkatan terhadap total konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, peran konsumsi non makanan mengalami penurunan. Namun demikian, pada beberapa kelompok proporsi pengeluaran masih cukup signifikan (sekitar 12 - 17 persen) sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk perumahan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, perjalanan wisata, hotel, dan sewa bangunan tempat tinggal.

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan maupun non makanan menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) maupun kualitas dari waktu ke waktu. Secara umum, pada seluruh kelompok konsumsi besaran pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemakmuran masyarakat mencapai puncaknya pada tahun 2012, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

²Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,86	3,58	5,77	3,58	2,47
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,37	3,13	3,05	9,19	(7,08)
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,34	3,74	3,30	2,51	(0,96)
d. Kesehatan & Pendidikan	10,99	5,24	8,48	(0,41)	2,24
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9,31	6,56	7,49	(5,28)	0,17
f. Hotel & Restoran	11,11	8,46	5,76	4,39	(1,04)
g. Lainnya	7,14	10,57	6,65	(0,43)	1,29
Total Konsumsi	8,00	5,21	3,63	1,28	0,60

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016³

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,24	8,69	4,69	7,96	7,98
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,37	4,76	2,74	2,17	2,29
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,45	5,97	6,80	6,30	1,39
d. Kesehatan & Pendidikan	6,46	5,88	7,54	5,39	0,72
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,54	4,14	4,83	5,11	2,52
f. Hotel & Restoran	5,69	10,10	7,77	7,27	2,85
g. Lainnya	9,76	(2,33)	0,96	3,47	1,92
Total Konsumsi	5,42	6,52	5,41	6,59	4,21

³Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tingkat perubahan harga implisit disajikan dalam tabel 9. Data tersebut memberikan informasi perubahan harga setiap tahunnya. Peningkatan harga tertinggi terjadi di tahun 2015 sebesar 6,59 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan harga yang cukup signifikan untuk kelompok makanan, minuman dan rokok serta kelompok hotel dan restoran. Pada tahun 2016, terjadi perlambatan peningkatan harga secara umum, yaitu sebesar 4,21 persen. Jika dilihat secara rinci, kelompok makanan, minuman dan rokok mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan yaitu 7,98 persen dibandingkan tahun 2015, sementara untuk harga komoditi kelompok konsumsi lainnya relatif lebih stabil.

<http://kaltim.bps.go.id>

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan Konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dalam PDRB Kalimantan Timur masih sangat kecil jika dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Meskipun demikian, peranan institusi ini dalam perekonomian wilayah masih dapat ditingkatkan lagi mengingat fungsi lembaga non profit yang cukup penting bagi masyarakat atau rumah tangga. Tabel 10 menunjukkan nilai dan proporsi LNPRT dalam perekonomian Kalimantan Timur.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.301,07	1.766,36	2.090,68	2.460,19	2.439,03
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.173,39	1.473,88	1.634,57	1.770,23	1.698,70
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,26	0,34	0,40	0,49	0,48
Pertumbuhan ⁴ (Persen)	4,95	25,61	10,90	8,30	(4,04)

Proporsi nilai konsumsi LNPRT terhadap PDRB relatif masih kecil yaitu hanya sekitar 0,20 persen hingga 0,40 persen setiap tahunnya. Jika dilihat secara nominal (menurut harga berlaku) perkembangannya terus meningkat dari Rp.1.301,07 miliar di tahun 2012 hingga mencapai Rp.2.460,19 miliar pada tahun 2015, sebelum mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar Rp.2.439,03 miliar. Pertumbuhan positif terjadi selama periode tahun 2012-2015, sedangkan di tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,04 persen. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap penurunan tersebut adalah akibat berkurangnya aktivitas partai-partai politik pasca pelaksanaan pemilu di tahun 2014-2015.

⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan konsumsi LNPRRT merupakan nilai total konsumsi akhir domestik dalam perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	17.342,81	20.281,62	23.523,17	25.079,72	24.143,52
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	15.971,39	17.532,58	17.562,26	16.197,10	14.578,01
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,45	3,91	4,46	4,98	4,76
Konsumsi Pemerintah per-kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	5.420,14	6.191,35	7.018,91	7.319,13	6.895,72
b. ADHK 2010	4.991,53	5.352,15	5.240,28	4.726,87	4.163,68
Pertumbuhan⁵ (<i>Persen</i>)					
a. Total konsumsi pemerintah	6,83	9,77	0,17	(7,77)	(10,00)
b. Konsumsi perkapita	4,28	7,22	(2,09)	(9,80)	(11,91)
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	3.200	3.276	3.351	3.427	3.501

Berdasarkan nilai harga berlaku, konsumsi akhir pemerintah pada periode tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan, namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2016. Pada tahun 2012, total konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 17.342,81 miliar rupiah, kemudian terus meningkat terus hingga mencapai 25.079,72 miliar rupiah pada tahun 2015. Pada tahun 2016, nilai konsumsi pemerintah mengalami penurunan menjadi sebesar 24.143,52 miliar rupiah.

Sementara itu, nilai konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan positif hingga tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016, terjadi penurunan konsumsi pemerintah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi di tahun 2013, dimana besaran pertumbuhan mencapai 9,77 persen.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

Kemudian di tahun 2014, terjadi perlambatan sehingga besaran pertumbuhan hanya sebesar 0,17 persen. Pada tahun 2015, konsumsi pemerintah tumbuh negatif sebesar 7,77 persen dan berlanjut di tahun 2016 yang turun sebesar 10,00 persen.

Seiring dengan penurunan pada nilai konsumsi pemerintah, peranan komponen tersebut terhadap total PDRB juga mengalami penurunan di tahun 2016. Pada tahun 2012, proporsi konsumsi pemerintah adalah sebesar 3,45 persen terhadap total PDRB, kemudian besaran tersebut terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 4,98 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, proporsi konsumsi pemerintah terhadap total PDRB pengeluaran mengalami penurunan menjadi 4,76 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita pada atas dasar harga berlaku menurun dari sebesar Rp.7.319,13 ribu di tahun 2015 menjadi sebesar Rp.6.895,72 ribu pada tahun 2016.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁶					
<i>a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)</i>	11.743,06	13.764,75	16.460,79	19.087,64	18.270,96
<i>(% Thdp Total Konsumsi Pemerintah)</i>	67,71	67,87	69,98	76,11	75,68
<i>b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)</i>	5.599,75	6.516,86	7.062,38	5.992,07	5.872,56
<i>(% Thdp Total Konsumsi Pemerintah)</i>	32,29	32,13	30,02	23,89	24,32
Total Konsumsi (Miliar Rp)	17.342,81	20.281,62	23.523,17	25.079,72	24.143,52
<i>(% Thdp Total Konsumsi Pemerintah)</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					

⁶Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Konsumsi Kolektif	10,70	8,97	0,07	0,25	(9,37)
b. Konsumsi Individu	(0,64)	11,50	0,38	(24,53)	(11,74)
Total Konsumsi	6,83	9,77	0,17	(7,77)	(10,00)
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit⁷					
a. Konsumsi Kolektif	6,22	7,57	19,51	15,67	5,62
b. Konsumsi Individu	10,02	4,37	7,96	12,43	11,04
Total Konsumsi	7,45	6,53	15,79	15,60	6,96

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2013. Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi peningkatan konsumsi pemerintah per kapita masing-masing sebesar 4,28 persen dan 7,22 persen. Namun peningkatan tersebut tidak berkelanjutan, pada tahun-tahun berikutnya konsumsi pemerintah per kapita mengalami kontraksi. Pada tahun 2014, konsumsi pemerintah per kapita mengalami penurunan sebesar 2,09 persen, dan di tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup tajam hingga 9,80 persen. Penurunan yang juga signifikan pada konsumsi pemerintah per kapita terjadi di tahun 2016, mencapai 11,91 persen. Turunnya penerimaan pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) dan pajak, menjadikan pendapatan daerah Kalimantan Timur menurun. Sebagai dampaknya, total konsumsi pemerintah yang telah mengalami kontraksi di tahun 2015 kembali mengalami hal yang sama serta semakin dalam pada tahun 2016.

Berdasarkan strukturnya, sebagian besar dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk konsumsi kolektif, dengan proporsi sekitar 66 hingga 76 persen setiap tahunnya. Secara nominal, konsumsi kolektif ini mengalami peningkatan selama periode 2012 - 2015, namun menurun pada tahun 2016 (lihat Tabel 12). Pada tahun 2012, alokasi untuk konsumsi kolektif sebesar Rp. 11,74 triliun terus meningkat hingga mencapai Rp. 19,09 triliun di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, besaran konsumsi pemerintah secara kolektif turun menjadi Rp. 18,27 triliun. Kondisi yang sama dengan konsumsi kolektif juga terjadi pada konsumsi individu. Hingga tahun 2014, aktivitas konsumsi tersebut terus mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada periode berikutnya. Nominal konsumsi individu pada tahun 2012 sebesar Rp. 5,60 triliun, terus

⁷Tingkat perubahan harga produk konsumsi

meningkat hingga menjadi Rp. 7,06 triliun di tahun 2014. Pada tahun 2015, nominal konsumsi individu turun menjadi Rp. 5,99 triliun dan berlanjut di tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 5,87 triliun.

<http://kaltim.bps.go.id>

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). PMTB dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor..

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	124.671,83	129.083,65	139.830,35	145.766,48	144.794,38
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	110.334,68	111.846,99	117.106,16	115.380,24	107.405,55
<i>Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)</i>	24,77	24,87	26,51	28,94	28,55
Struktur PMTB ^[1]					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	71.247,52	78.328,72	87.783,13	89.908,12	87.350,37
(%)	57,15	60,68	62,78	61,68	60,33
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>)	53.424,30	50.754,93	52.047,22	55.858,36	57.444,01
(%)	42,85	39,32	37,22	38,32	39,67
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	124.671,83	129.083,65	139.830,35	145.766,48	144.794,38
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ^[2] (%)					
a. Bangunan	6,36	4,72	6,22	(2,79)	(6,96)
b. Non Bangunan	2,41	(2,90)	2,62	0,40	(6,84)
Total PMTB	4,59	1,37	4,70	(1,47)	(6,91)

Penurunan kinerja sektor konstruksi di tahun 2016 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan sekitar minus 3,4 persen terlihat pula pada perkembangan komponen PMTB yang juga mengalami pertumbuhan negatif. Di tahun 2016, komponen tersebut mengalami penurunan kinerja sebesar 6,91 persen. Laporan realisasi investasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa jika

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan realisasi penanaman modal, baik PMA maupun PMDN, di tahun 2016. Penurunan yang terjadi sangat signifikan, yaitu dari nilai realisasi sebesar 39 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 23 triliun rupiah di tahun 2016, atau penurunan sebesar 40,79 persen. Nilai realisasi investasi di tahun 2016 tersebut jauh lebih rendah dari target yang telah ditentukan, yaitu hanya sebesar 59,27 persen dari target investasi. Secara nominal atas dasar harga berlaku, PMTB menurun dari Rp. 145,77 triliun di tahun 2015 menjadi Rp.144,79 triliun pada tahun 2016.

Hingga tahun 2016, peranan PMTB dalam bentuk bangunan masih mendominasi yaitu sekitar 60 persen dari total PMTB. Namun demikian, terdapat kecenderungan penurunan peran, dari sekitar 62 persen di tahun 2014 menjadi sekitar 60 persen di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan investasi dalam bentuk ini pertumbuhannya mengalami kontraksi yang cukup tinggi sebesar 6,96 persen pada tahun 2016. Sejalan dengan PMTB bangunan, PMTB dalam bentuk non bangunan pun mengalami kontraksi sebesar 6,84 persen pada tahun 2016.

<http://kaltim.bps.go.id>

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen ekspor neto antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	8.232,43	9.842,94	12.344,42	5.771,87	1.922,89
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	5.510,75	4.512,59	5.836,97	3.742,19	1.302,84
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,64	1,90	2,34	1,15	0,38

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 proporsi komponen perubahan inventori terhadap PDRB penggunaan Kalimantan Timur selalu positif. Pada tahun 2016 proporsi terhadap PDRB ADHB sebesar 0,38 persen lebih rendah 0,77 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun

demikian disadari bahwa tingkat sensitifitas analisis ini masih rendah untuk mengarah pada suatu kesimpulan tertentu, karena faktor keterbatasan ketersediaan dan kontinuitas data yang dapat dihimpun serta sangat beragamnya komoditas barang yang harus dipantau, sehingga informasi ini masih perlu disempurnakan.

<http://kaltim.bps.go.id>

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor luar negeri menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	364.745,23	371.841,81	350.299,17	256.979,36	197.483,43
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	318.622,95	324.367,42	299.360,40	251.249,53	226.417,67
<i>Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)</i>	72,46	71,63	66,41	51,02	38,95
Struktur Ekspor[1]					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	362.710,11	369.609,35	348.339,00	254.957,41	195.449,26
(%)	99,44	99,40	99,44	99,21	98,97
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	2.035,12	2.232,46	1.960,17	2.021,94	2.034,18
(%)	0,56	0,60	0,56	0,79	1,03
Total ekspor	364.745,23	371.841,81	350.299,17	256.979,36	197.483,43
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[2]					
- Barang	1,64	1,82	(7,63)	(16,14)	(9,92)
- Jasa	11,53	(1,00)	(21,19)	(2,63)	(4,00)
Total ekspor	1,69	1,80	(7,71)	(16,07)	(9,88)

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor luar negeri Kalimantan Timur berupa barang (diatas 98 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Harga minyak mentah Indonesia hingga bulan Desember 2016 berdasarkan perhitungan Formula ICP (*Indonesia Crude Price*) meningkat menjadi US\$ 51,65 per barel dari sebesar US\$ 37,68 per barel pada Desember 2015. Sedangkan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan langsung (spot) yang berlaku tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2016 pada titik serah penjualan secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*FOB vessel*) adalah US\$ 54,70/Ton,

sebagaimana dirilis dalam portal www.minerba.esdm.go.id. Rata-rata HBA 2016 ini naik US\$ 1,41/ton atau meningkat 2,65% dibandingkan dengan rata-rata HBA 2015 sebesar US\$ 53,29/ton. Tentu saja mulai meningkatnya/membaiknya harga minyak mentah dan batubara ini membawa efek cukup besar terhadap daerah penghasil, seperti Kalimantan Timur. Seiring dengan mulai meningkatnya harga tersebut, pertumbuhan ekspor Kalimantan Timur pun mulai membaik walaupun secara total masih mengalami kontraksi sebesar 9,88% pada tahun 2016.

<http://kaltim.bps.go.id>

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Nilai pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor yang dihitung, didalamnya masih terkandung nilai dari produk yang berasal dari impor. Berdasarkan definisi, PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik suatu wilayah. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan dengan cara mengurangkan nilai PDRB dengan nilai impor. Hasil pengurangan tersebut secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor/kategori). Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor Luar Negeri, termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kalimantan Timur di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun non makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	85.230,30	110.413,72	119.093,44	88.717,19	65.089,94
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	69.320,92	80.286,68	80.791,31	83.607,15	72.988,24
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	16,93	21,27	22,58	17,61	12,84
Struktur Impor [1]					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	78.865,00	102.454,56	110.644,03	78.750,12	54.415,16
(%)	92,53	92,79	92,91	88,77	83,60
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	6.365,30	7.959,16	8.449,41	9.967,06	10.674,78
(%)	7,47	7,21	7,09	11,23	16,40
Total impor	85.230,30	110.413,72	119.093,44	88.717,19	65.089,94
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[2]					
- Barang	16,77	16,26	1,41	3,04	(13,85)
- Jasa	5,89	11,07	(8,27)	9,11	0,88
Total impor	15,76	15,82	0,63	3,49	(12,70)

Impor luar negeri merupakan komponen pengurang dalam pembentukan PDRB Pengeluaran. Perkembangan yang terjadi menunjukkan masih kuatnya ketergantungan Kalimantan Timur terhadap produk impor luar negeri, dimana pada tahun 2015 proporsi impor luar negeri sebesar 17,61% terhadap total PDRB Kalimantan Timur. Meskipun proporsinya turun menjadi 12,84% pada tahun 2016, penurunan ini lebih disebabkan oleh turunnya harga minyak mentah, sebagai komponen utama impor luar negeri Kalimantan Timur. Selama kurun waktu 2012-2014, impor luar negeri Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan yakni dari sebesar Rp. 85,23 triliun, meningkat menjadi Rp. 119,09 triliun di tahun 2014. Di tahun 2015, besaran impor mengalami penurunan hingga ke level Rp. 88,72 triliun dan kembali turun pada tahun 2016 menjadi Rp. 65,09 triliun.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor luar negeri berbentuk impor barang yang memiliki porsi diatas 80 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Selama periode 2012 - 2014, impor luar negeri dalam bentuk barang cenderung mengalami peningkatan walaupun sedikit. Namun, sejak tahun 2015 proporsi impor luar negeri barang turun menjadi 88,77% dan turun kembali di tahun 2016 menjadi 83,60%..

Jika dilihat secara riil (atas dasar harga konstan) nilai impor barang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2012 sebesar 16,77 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan impor barang ini sedikit melemah menjadi sebesar 16,26 persen dan sebesar 1,41% pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, meskipun nilai impor barang adh berlaku turun, tetapi pertumbuhannya menguat menjadi 3,04%. Meskipun pertumbuhan impor luar negeri barang menguat di tahun 2015, pada tahun 2016 pertumbuhan impor luar negeri barang terkontraksi menjadi 13,85%. Tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan impor luar negeri barang, pertumbuhan impor luar negeri pada tahun 2016 melambat menjadi 0,88% setelah sebelumnya menguat di tahun 2015 sebesar 9,11%.

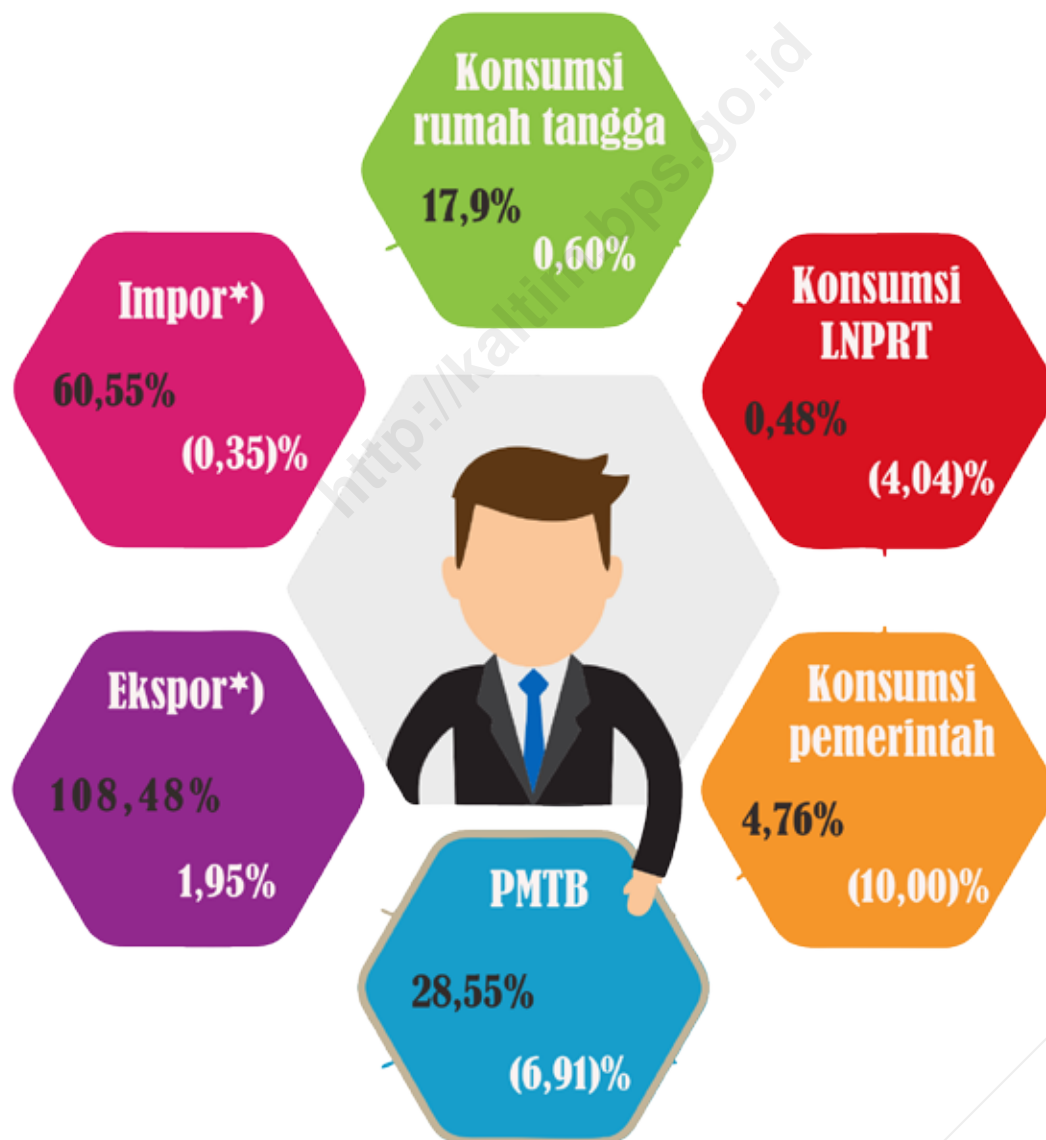
3.9 PERKEMBANGAN EKSPOR NETO ANTAR DAERAH

Ekspor neto antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, ekspor neto antar daerah juga bisa bertanda positif maupun negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan ekspor neto antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGELUARAN, 2012-2016



Catatan:

- Warna hitam = Distribusi komponen terhadap PDRB ADHB Prov. Kalimantan Timur

- Warna putih = Laju pertumbuhan komponen PDRB ADHK 2010

*) Ekspor/impor luar negeri ditambah ekspor/impor antar daerah

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per-kapita. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kalimantan Timur rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	503.402,03	519.131,87	527.515,26	503.691,11	507.073,76
- ADHK 2010	428.877,71	438.532,91	446.029,05	440.647,70	438.977,04
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	157.327,88	158.474,84	157.401,46	146.994,43	144.827,32
- ADHK 2010	134.036,85	133.870,48	133.087,38	128.596,19	125.377,95
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK (%)	2,75	(0,12)	(0,58)	(3,37)	(2,50)
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	3.199,70	3.275,80	3.351,40	3.426,60	3.501,23
Pertumbuhan Penduduk *)	2,47%	2,44%	2,40%	2,37%	2,81%

*) *Angka Revisi*

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penurunan sejak tahun 2013 dari sekitar Rp. 158,47 juta per kapita menjadi sekitar Rp.157,40 juta per kapita di tahun 2014. Penurunan terus berlanjut hingga di tahun 2016, dimana nilai PDRB per kapita menjadi sebesar Rp.144,83 juta per kapita. Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga terus melemah dan mengalami kontraksi sejak tahun 2013. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” terkontraksi hingga 3,37 persen dan kembali mengalami kontraksi pada tahun 2016 sebesar 2,50 persen.

<http://kaltim.bps.go.id>

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumahtangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Kontribusi yang diberikan oleh komponen konsumsi rumah tangga terhadap besaran nilai PDRB, hanya sekitar 11-16 persen setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur, hanya sebagian kecilnya yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga, meskipun di dalamnya sudah termasuk sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2012—2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	65.493,37	73.396,42	80.180,29	86.563,22	90.750,79
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	539.032,80	554.654,65	557.058,22	539.801,76	550.077,25
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,12	0,13	0,14	0,16	0,16

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga hanya 0,12 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Terjadinya peningkatan rasio yang terjadi pada tahun 2016 yang sebesar 0,16 lebih disebabkan karena pertumbuhan ekspor lebih lambat dari pertumbuhan konsumsi rumahtangga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa hanya sebagian kecil penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kalimantan Timur digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2012—2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	65.493,37	73.396,42	80.180,29	86.563,22	90.750,79
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	124.671,83	129.083,65	139.830,35	145.766,48	144.794,38
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	0,53	0,57	0,57	0,59	0,63

Tetapi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kalimantan Timur, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB juga cenderung meningkat, dari sebesar 0,53 pada tahun 2012 dan menjadi 0,63 pada tahun 2016. Sama halnya dengan perubahan pada komponen ekspor, pertumbuhan investasi di Kalimantan Timur relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
<i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah tangga	65.493,37	73.396,42	80.180,29	86.563,22	90.750,79
b. LNPRT	1.301,07	1.766,36	2.090,68	2.460,19	2.439,03
c. Pemerintah	17.342,81	20.281,62	23.523,17	25.079,72	24.143,52
Jumlah	84.137,26	95.444,40	105.794,14	114.103,13	117.333,33
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	503.402,03	519.131,87	527.515,26	503.691,11	507.073,76
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	16,71	18,39	20,06	22,65	23,14

Seiring konsumsi akhir yang makin meningkat setiap tahunnya dan serta didukung oleh adanya perbaikan harga komoditas ekspor, terutama di tahun 2016, maka terdapat tren peningkatan proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB. Pada tahun 2012, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB sebesar 16,71 persen. Proporsi ini terus mengalami peningkatan sepanjang waktu hingga menjadi sebesar 23,14 persen pada tahun 2016.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah/negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2012—2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)</i>	539.032,80	554.654,65	557.058,22	539.801,76	550.077,25
<i>Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)</i>	124.671,83	129.083,65	139.830,35	145.766,48	144.794,38
Rasio Ekspor terhadap PMTB	4,32	4,30	3,98	3,70	3,80

Ekspor Kalimantan Timur mempunyai nilai yang lebih tinggi dari komponen PMTB dengan rasio sekitar 3 hingga 4. Namun demikian terdapat kecenderungan menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2012, nilai rasio ekspor terhadap PMTB adalah sebesar 4,32, kemudian menurun di tahun berikutnya menjadi 4,30. Pada tahun 2016, nilai rasio tersebut menjadi sebesar 3,80.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/wilayah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>PDRB (ADHB) (Miliar Rp)</i>	503.402,03	519.131,87	527.515,26	503.691,11	507.073,76
<i>Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)</i>	252.672,28	269.893,77	287.511,88	301.752,13	307.054,09
Rasio PDRB terhadap Impor	1,99	1,92	1,83	1,67	1,65

Rasio PDRB terhadap impor berkisar diantara 1 hingga 2, serta cenderung menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2012, rasio PDRB terhadap impor adalah 1,99 yang kemudian menurun menjadi 1,92 pada tahun 2013. Rasio ini terus menurun tiap tahunnya hingga menjadi 1,65 pada tahun 2016. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa ketergantungan PDRB Kalimantan Timur terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/wilayah lain semakin besar selama periode 2012-2016.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidak seimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Kalimantan Timur, 2012—2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Permintaan					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	503.402,03	519.131,87	527.515,26	503.691,11	507.073,76
%	66,58	65,79	64,72	62,54	62,28
Total nilai Impor ⁹⁾ ADHB (Miliar Rp)	252.672,28	269.893,77	287.511,88	301.752,13	307.054,09
%	33,42	34,21	35,28	37,46	37,72
Total Permintaan Akhir⁹⁾(Miliar Rp)	756.074,31	789.025,64	815.027,13	805.443,24	814.127,85
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**) Impor Luar Negeri ditambah Impor Antar Daerah*

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri/wilayah, dengan besaran nilai sekitar 32 hingga 37 persen dari total permintaan akhir. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi dari hasil produksi domestik sekitar 63 hingga 68 persen. Selama periode 2012-2016 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut terdapat peningkatan permintaan akhir, dari Rp.756,07 triliun di tahun 2012 hingga menjadi sebesar Rp.814,13 triliun di tahun 2016.

Di sisi lain “penyediaan”, produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing baru sekitar 503,40 triliun rupiah pada tahun 2012, kemudian sebesar 519,13 triliun rupiah pada tahun 2013, dan sebesar 527,51 triliun rupiah di tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016, penyediaan domestik masing-masing sebesar 503,69 triliun rupiah dan 507,07 triliun rupiah.

Walaupun terdapat peningkatan nilai pada penyediaan di tahun 2016, namun nilai penyediaan domestik tersebut belum mampu memenuhi seluruh permintaan. Oleh karena itu,

⁹ Termasuk diskrepansi statistik

maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai sebesar 252,67 triliun rupiah pada tahun 2012 dan terus meningkat hingga mencapai 307,05 triliun rupiah di tahun 2016.

<http://kaltim.bps.go.id>

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Neraca Perdagangan menggambarkan aktivitas dengan pihak luar negeri/wilayah (non residen) berupa transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit.

Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2012 - 2016, posisi Neraca Perdagangan provinsi Kalimantan Timur selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Kalimantan Timur selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Provinsi Kalimantan Timur, 2012 - 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor ^{*)} (ADHB) (Miliar Rp)	539.032,80	554.654,65	557.058,22	539.801,76	550.077,25
Nilai Impor ^{*)} (ADHB) (Miliar Rp)	252.672,28	269.893,77	287.511,88	301.752,13	307.054,09
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	286.360,52	284.760,88	269.546,35	238.049,63	243.023,16
Rasio ekspor thdp Impor	2,13	2,06	1,94	1,79	1,79

^{*)} Ekspor/Impor Luar Negeri ditambah Ekspor/Impor Antar Daerah

Tetapi, surplus perdagangan yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2015 cenderung mengalami penurunan dan mulai meningkat pada tahun 2016, dimana titik

tertingginya sebesar 286,36 triliun terjadi pada tahun 2012. Pada tahun-tahun berikutnya, surplus ini turun menjadi 284,76 triliun rupiah di tahun 2013, kemudian pada tahun berikutnya kembali turun menjadi 269,55 triliun rupiah. Penurunan terus berlanjut hingga menjadi 238,05 triliun rupiah pada tahun 2015. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan menjadi sebesar 243,02 triliun rupiah. Sehingga rasio ekspor terhadap impor juga cenderung turun setiap tahunnya dan meningkat sedikit pada tahun 2016. Pada tahun 201, rasionya sebesar 2,13 kemudian menjadi sekitar 1,79 pada tahun 2016.

<http://kaltim.bps.go.id>

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d +1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor LN, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor LN.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional,
Provinsi Kalimantan Timur, 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	364.745,23	371.841,81	350.299,17	256.979,36	197.483,43
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	85.230,30	110.413,72	119.093,44	88.717,19	65.089,94
(X – M) (Miliar Rp)	279.514,92	261.428,08	231.205,73	168.262,17	132.393,49
(X +M) (Miliar Rp)	449.975,53	482.255,53	469.392,61	345.696,54	262.573,38
R P I	0,62	0,54	0,49	0,49	0,50

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012-2016, posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari impor luar negeri. Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut adalah menurun sejak tahun 2014, dari 364,74 triliun rupiah pada tahun 2012 kemudian mengalami peningkatan menjadi 371,84 triliun rupiah di tahun 2013, yang selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2016 menjadi 197,48 triliun rupiah. Rasio Perdagangan internasional Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2012-2013 selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, dengan rasio yang cukup besar yaitu lebih dari 0,5. Namun pada tahun 2014 dan 2015, Rasio Perdagangan Internasional berada di bawah level 0,5 yaitu 0,49 di tahun 2014 dan 0,49 pada tahun 2015. Rasio Perdagangan Internasional kembali meningkat pada level 0,5 di tahun 2016.

BAB V

PENUTUP



1. Nilai nominal PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 mencapai 507,07 triliun rupiah yang meningkat 3,38 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan nilai ekspor neto, dimana nilai ekspor meningkat lebih tinggi daripada peningkatan nilai impor sebagai komponen pengurang pada PDRB.
2. Seiring dengan menurunnya peran ekspor neto terhadap total PDRB Kalimantan Timur, peran dari komponen lain menjadi meningkat.
3. Hanya komponen konsumsi rumah tangga dan komponen ekspor yang masih tumbuh pada tahun 2016, sedangkan kompoenen PDRB pengeluaran yang lainnya mengalami kontraksi.
4. Pertumbuhan PDRB per-kapita secara “riil” juga terus melemah. Pada tahun 2012 pertumbuhan PDRB per-kapita sebesar 2,75 persen, melemah hingga terkontraksi sebesar 0,12 persen pada tahun 2013, terkontraksi 0,58 persen pada tahun 2014, kembali terkontraksi sebesar 3,37 persen di tahun 2015, dan pada tahun 2016 masih mengalami kontraksi sebesar 2,50 persen..
5. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor dan PMTB masih kecil yakni masing-masing sebesar 0,16 dan 0,63 pada tahun 2016.
6. Sampai dengan tahun 2016, ekspor Kalimantan Timur mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB dengan rasio sekitar 3 dan mulai meningkat setelah beberapa tahun sebelumnya cenderung menurun.
7. Ketergantungan PDRB Kalimantan Timur terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/provinsi lain semakin besar, yang diindikasikan dengan semakin kecilnya rasio PDRB terhadap impor pada interval tahun tersebut dari 1,99 pada tahun 2012 menjadi sebesar 1,65 pada tahun 2016.
8. Surplus perdagangan Provinsi Kalimantan Timur yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2015 cenderung mengalami penurunan dan mulai meningkat pada tahun 2016.



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65.493.370,52	73.396.421,73	80.180.286,67	86.563.223,85	90.750.792,91
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	22.796.304,35	25.665.002,42	27.605.865,04	30.869.912,14	34.157.146,79
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.954.972,39	2.112.170,26	2.219.475,30	2.475.856,08	2.353.062,93
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan P	11.939.506,23	13.125.647,95	14.348.613,49	15.635.744,02	15.700.685,87
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.796.756,17	6.459.187,87	7.227.155,67	7.585.122,03	7.810.501,06
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12.162.393,24	13.497.373,39	14.966.065,50	14.899.997,06	15.302.518,02
1.f. Hotel dan Restoran	7.240.844,83	8.646.230,33	9.670.670,80	10.828.935,70	11.021.213,40
1.g. Lainnya	3.602.593,32	3.890.809,51	4.142.440,87	4.267.656,82	4.405.664,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.301.073,95	1.766.359,98	2.090.680,95	2.460.192,02	2.439.025,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	17.342.813,74	20.281.615,33	23.523.174,00	25.079.715,17	24.143.516,00
3.a. Konsumsi Kolektif	11.743.058,97	13.764.754,31	16.460.792,70	19.087.644,14	18.270.955,60
3.b. Konsumsi Individu	5.599.754,77	6.516.861,02	7.062.381,30	5.992.071,02	5.872.560,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	124.671.825,84	129.083.647,03	139.830.347,87	145.766.483,58	144.794.383,71
4.a. Bangunan	71.247.522,64	78.328.717,93	87.783.129,97	89.908.118,64	87.350.369,07
4.b. Non-Bangunan	53.424.303,19	50.754.929,10	52.047.217,91	55.858.364,93	57.444.014,64
5. Perubahan Inventori	8.232.426,45	9.842.941,81	12.344.421,20	5.771.865,95	1.922.886,69
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	364.745.226,47	371.841.805,18	350.299.171,85	256.979.357,18	197.483.434,72
6.a. Barang	362.710.110,07	369.609.345,53	348.338.998,31	254.957.414,40	195.449.256,85
6.b. Jasa	2.035.116,40	2.232.459,64	1.960.173,54	2.021.942,78	2.034.177,87
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	85.230.302,10	110.413.720,41	119.093.437,40	88.717.185,71	65.089.941,02
7.a. Barang	78.865.002,92	102.454.559,59	110.644.029,59	78.750.124,32	54.415.158,16
7.b. Jasa	6.365.299,19	7.959.160,82	8.449.407,82	9.967.061,40	10.674.782,86
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	6.845.596,95	23.332.798,23	38.340.610,95	69.787.454,56	110.629.663,71
8.a. Ekspor	174.287.573,62	182.812.845,90	206.759.049,68	282.822.400,97	352.593.812,46
8.b. Impor	167.441.976,67	159.480.047,67	168.418.438,73	213.034.946,41	241.964.148,75
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	503.402.031,81	519.131.868,87	527.515.256,10	503.691.106,60	507.073.762,02

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	58.004.004,37	61.025.600,12	63.242.816,53	64.054.135,78	64.441.618,03
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	19.865.413,87	20.577.411,28	21.140.978,71	21.897.530,05	22.437.811,72
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.800.183,58	1.856.516,43	1.898.779,12	2.073.186,67	1.926.340,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan P	10.744.128,84	11.146.023,09	11.408.752,96	11.695.536,35	11.582.807,71
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4.893.822,01	5.150.312,78	5.358.695,76	5.336.640,67	5.456.122,95
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11.469.165,76	12.221.837,30	12.927.118,08	12.244.928,56	12.266.136,53
1.f. Hotel dan Restoran	6.324.729,72	6.859.639,84	7.119.384,04	7.431.872,94	7.354.357,92
1.g. Lainnya	2.906.560,58	3.213.859,39	3.389.107,87	3.374.440,54	3.418.040,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.173.386,52	1.473.881,54	1.634.573,64	1.770.226,13	1.698.700,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15.971.387,44	17.532.580,56	17.562.259,18	16.197.098,91	14.578.009,64
3.a. Konsumsi Kolektif	10.893.334,43	11.870.473,81	11.878.568,31	11.907.826,04	10.792.308,39
3.b. Konsumsi Individu	5.078.053,01	5.662.106,75	5.683.690,87	4.289.272,86	3.785.701,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	110.334.678,17	111.846.992,44	117.106.156,19	115.380.244,70	107.405.552,66
4.a. Bangunan	61.802.201,98	64.719.533,77	68.746.013,69	66.826.169,80	62.174.738,59
4.b. Non-Bangunan	48.532.476,18	47.127.458,67	48.360.142,50	48.554.074,89	45.230.814,07
5. Perubahan Inventori	5.510.745,84	4.512.586,45	5.836.965,14	3.742.190,57	1.302.838,09
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	318.622.948,06	324.367.423,20	299.360.399,75	251.249.527,01	226.417.674,87
6.a. Barang	316.796.725,67	322.559.479,92	297.935.492,13	249.862.037,34	225.085.701,40
6.b. Jasa	1.826.222,39	1.807.943,28	1.424.907,62	1.387.489,67	1.331.973,47
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	69.320.924,94	80.286.680,53	80.791.306,87	83.607.146,67	72.988.235,13
7.a. Barang	63.457.853,24	73.774.636,12	74.817.978,95	77.089.594,07	66.413.249,37
7.b. Jasa	5.863.071,70	6.512.044,41	5.973.327,92	6.517.552,59	6.574.985,76
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(11.418.514,81)	(1.939.477,05)	22.077.185,27	71.861.426,34	96.120.885,94
8.a. Ekspor	135.572.108,26	142.673.697,25	175.791.209,04	222.302.904,82	256.373.219,91
8.b. Impor	146.990.623,07	144.613.174,30	153.714.023,77	150.441.478,48	160.252.333,97
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	428.877.710,64	438.532.906,74	446.029.048,84	440.647.702,76	438.977.044,54

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	13,01	14,14	15,20	17,19	17,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,53	4,94	5,23	6,13	6,74
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,39	0,41	0,42	0,49	0,46
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,37	2,53	2,72	3,10	3,10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,15	1,24	1,37	1,51	1,54
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,42	2,60	2,84	2,96	3,02
1.f. Hotel dan Restoran	1,44	1,67	1,83	2,15	2,17
1.g. Lainnya	0,72	0,75	0,79	0,85	0,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,26	0,34	0,40	0,49	0,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	3,45	3,91	4,46	4,98	4,76
3.a. Konsumsi Kolektif	2,33	2,65	3,12	3,79	3,60
3.b. Konsumsi Individu	1,11	1,26	1,34	1,19	1,16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24,77	24,87	26,51	28,94	28,55
4.a. Bangunan	14,15	15,09	16,64	17,85	17,23
4.b. Non-Bangunan	10,61	9,78	9,87	11,09	11,33
5. Perubahan Inventori	1,64	1,90	2,34	1,15	0,38
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	72,46	71,63	66,41	51,02	38,95
6.a. Barang	72,05	71,20	66,03	50,62	38,54
6.b. Jasa	0,40	0,43	0,37	0,40	0,40
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	16,93	21,27	22,58	17,61	12,84
7.a. Barang	15,67	19,74	20,97	15,63	10,73
7.b. Jasa	1,26	1,53	1,60	1,98	2,11
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	1,36	4,49	7,27	13,86	21,82
8.a. Ekspor	34,62	35,22	39,19	56,15	69,54
8.b. Impor	33,26	30,72	31,93	42,29	47,72
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	13,52	13,92	14,18	14,54	14,68
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,63	4,69	4,74	4,97	5,11
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,42	0,42	0,43	0,47	0,44
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,51	2,54	2,56	2,65	2,64
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,14	1,17	1,20	1,21	1,24
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,67	2,79	2,90	2,78	2,79
1.f. Hotel dan Restoran	1,47	1,56	1,60	1,69	1,68
1.g. Lainnya	0,68	0,73	0,76	0,77	0,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,27	0,34	0,37	0,40	0,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	3,72	4,00	3,94	3,68	3,32
3.a. Konsumsi Kolektif	2,54	2,71	2,66	2,70	2,46
3.b. Konsumsi Individu	1,18	1,29	1,27	0,97	0,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	25,73	25,50	26,26	26,18	24,47
4.a. Bangunan	14,41	14,76	15,41	15,17	14,16
4.b. Non-Bangunan	11,32	10,75	10,84	11,02	10,30
5. Perubahan Inventori	1,28	1,03	1,31	0,85	0,30
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	74,29	73,97	67,12	57,02	51,58
6.a. Barang	73,87	73,55	66,80	56,70	51,28
6.b. Jasa	0,43	0,41	0,32	0,31	0,30
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	16,16	18,31	18,11	18,97	16,63
7.a. Barang	14,80	16,82	16,77	17,49	15,13
7.b. Jasa	1,37	1,48	1,34	1,48	1,50
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(2,66)	(0,44)	4,95	16,31	21,90
8.a. Ekspor	31,61	32,53	39,41	50,45	58,40
8.b. Impor	34,27	32,98	34,46	34,14	36,51
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	13,85	12,07	9,24	7,96	4,84
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	14,82	12,58	7,56	11,82	10,65
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	12,03	8,04	5,08	11,55	(4,96)
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan P	8,99	9,93	9,32	8,97	0,42
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	18,21	11,43	11,89	4,95	2,97
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12,12	10,98	10,88	(0,44)	2,70
1.f. Hotel dan Restoran	17,53	19,41	11,85	11,98	1,78
1.g. Lainnya	17,65	8,00	6,47	3,02	3,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,06	35,76	18,36	17,67	(0,86)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	14,79	16,95	15,98	6,62	(3,73)
3.a. Konsumsi Kolektif	17,59	17,22	19,59	15,96	(4,28)
3.b. Konsumsi Individu	9,32	16,38	8,37	(15,16)	(1,99)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	12,23	3,54	8,33	4,25	(0,67)
4.a. Bangunan	15,62	9,94	12,07	2,42	(2,84)
4.b. Non-Bangunan	8,02	(5,00)	2,55	7,32	2,84
5. Perubahan Inventori	17,57	19,56	25,41	(53,24)	(66,69)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(3,47)	1,95	(5,79)	(26,64)	(23,15)
6.a. Barang	(3,57)	1,90	(5,75)	(26,81)	(23,34)
6.b. Jasa	18,69	9,70	(12,20)	3,15	0,61
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	23,29	29,55	7,86	(25,51)	(26,63)
7.a. Barang	23,91	29,91	7,99	(28,83)	(30,90)
7.b. Jasa	16,00	25,04	6,16	17,96	7,10
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(124,57)	240,84	64,32	82,02	58,52
8.a. Ekspor	34,87	4,89	13,10	36,79	24,67
8.b. Impor	6,59	(4,76)	5,60	26,49	13,58
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,48	3,12	1,61	(4,52)	0,67

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	8,00	5,21	3,63	1,28	0,60
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,07	3,58	2,74	3,58	2,47
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8,38	3,13	2,28	9,19	(7,08)
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan P	5,36	3,74	2,36	2,51	(0,96)
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	11,03	5,24	4,05	(0,41)	2,24
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9,34	6,56	5,77	(5,28)	0,17
1.f. Hotel dan Restoran	11,20	8,46	3,79	4,39	(1,04)
1.g. Lainnya	7,19	10,57	5,45	(0,43)	1,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,95	25,61	10,90	8,30	(4,04)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	6,83	9,77	0,17	(7,77)	(10,00)
3.a. Konsumsi Kolektif	10,70	8,97	0,07	0,25	(9,37)
3.b. Konsumsi Individu	(0,64)	11,50	0,38	(24,53)	(11,74)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,59	1,37	4,70	(1,47)	(6,91)
4.a. Bangunan	6,36	4,72	6,22	(2,79)	(6,96)
4.b. Non-Bangunan	2,41	(2,90)	2,62	0,40	(6,84)
5. Perubahan Inventori	54,53	(18,11)	29,35	(35,89)	(65,19)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	1,69	1,80	(7,71)	(16,07)	(9,88)
6.a. Barang	1,64	1,82	(7,63)	(16,14)	(9,92)
6.b. Jasa	11,53	(1,00)	(21,19)	(2,63)	(4,00)
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15,76	15,82	0,63	3,49	(12,70)
7.a. Barang	16,77	16,26	1,41	3,04	(13,85)
7.b. Jasa	5,89	11,07	(8,27)	9,11	0,88
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(54,04)	(83,01)	(1.238,31)	225,50	33,76
8.a. Ekspor	15,84	5,24	23,21	26,46	15,33
8.b. Impor	3,60	(1,62)	6,29	(2,13)	6,52
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	5,26	2,25	1,71	(1,21)	(0,38)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012-2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	128,27	143,75	157,03	169,54	177,74
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	126,80	142,76	153,56	171,71	190,00
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	120,95	130,68	137,32	153,18	145,58
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	119,60	131,48	143,73	156,63	157,28
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	139,47	155,41	173,89	182,50	187,92
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	124,32	137,97	152,98	152,31	156,42
1.f. Hotel dan Restoran	137,71	164,44	183,93	205,96	209,61
1.g. Lainnya	157,62	170,23	181,24	186,72	192,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	122,64	166,49	197,06	231,89	229,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	123,75	144,72	167,85	178,96	172,28
3.a. Konsumsi Kolektif	123,17	144,38	172,66	200,21	191,65
3.b. Konsumsi Individu	124,99	145,46	157,63	133,74	131,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	128,32	132,86	143,92	150,03	149,03
4.a. Bangunan	128,84	141,64	158,74	162,58	157,96
4.b. Non-Bangunan	127,63	121,25	124,34	133,44	137,23
5. Perubahan Inventori	433,70	518,55	650,33	304,07	101,30
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	135,92	138,56	130,54	95,76	73,59
6.a. Barang	135,98	138,57	130,60	95,59	73,28
6.b. Jasa	125,44	137,60	120,82	124,63	125,38
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	133,14	172,48	186,03	138,58	101,68
7.a. Barang	134,90	175,25	189,26	134,70	93,08
7.b. Jasa	114,59	143,28	152,11	179,43	192,17
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	49,73	169,51	278,54	507,00	803,72
8.a. Ekspor	124,55	130,64	147,75	202,11	251,97
8.b. Impor	132,71	126,40	133,48	168,84	191,77
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	131,34	135,44	137,63	131,41	132,29

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2012-2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	113,60	119,52	123,86	125,45	126,21
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	110,50	114,46	117,60	121,81	124,81
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	111,38	114,86	117,48	128,27	119,18
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	107,63	111,65	114,28	117,16	116,03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	117,75	123,92	128,93	128,40	131,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	117,24	124,93	132,14	125,17	125,38
1.f. Hotel dan Restoran	120,29	130,46	135,40	141,35	139,87
1.g. Lainnya	127,17	140,61	148,28	147,64	149,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	110,60	138,93	154,07	166,86	160,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	113,97	125,11	125,32	115,58	104,02
3.a. Konsumsi Kolektif	114,26	124,51	124,60	124,90	113,20
3.b. Konsumsi Individu	113,34	126,38	126,86	95,74	84,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	113,56	115,12	120,53	118,75	110,55
4.a. Bangunan	111,76	117,03	124,31	120,84	112,43
4.b. Non-Bangunan	115,94	112,59	115,53	115,99	108,06
5. Perubahan Inventori	290,32	237,73	307,50	197,15	68,64
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	118,73	120,87	111,55	93,63	84,37
6.a. Barang	118,77	120,93	111,70	93,68	84,39
6.b. Jasa	112,56	111,44	87,83	85,52	82,10
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	108,29	125,41	126,20	130,60	114,01
7.a. Barang	108,55	126,19	127,98	131,86	113,60
7.b. Jasa	105,55	117,23	107,53	117,33	118,36
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(82,95)	(14,09)	160,39	522,07	698,31
8.a. Ekspor	96,88	101,96	125,62	158,86	183,21
8.b. Impor	116,50	114,62	121,83	119,24	127,01
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	111,89	114,41	116,37	114,96	114,53

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2012-2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	112,91	120,27	126,78	135,14	140,83
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	114,75	124,72	130,58	140,97	152,23
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	108,60	113,77	116,89	119,42	122,15
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan	111,13	117,76	125,77	133,69	135,55
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	118,45	125,41	134,87	142,13	143,15
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	106,04	110,44	115,77	121,68	124,75
1.f. Hotel dan Restoran	114,48	126,04	135,84	145,71	149,86
1.g. Lainnya	123,95	121,06	122,23	126,47	128,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	110,88	119,84	127,90	138,98	143,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	108,59	115,68	133,94	154,84	165,62
3.a. Konsumsi Kolektif	107,80	115,96	138,58	160,29	169,30
3.b. Konsumsi Individu	110,27	115,10	124,26	139,70	155,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	112,99	115,41	119,40	126,34	134,81
4.a. Bangunan	115,28	121,03	127,69	134,54	140,49
4.b. Non-Bangunan	110,08	107,70	107,62	115,04	127,00
5. Perubahan Inventori	149,39	218,12	211,49	154,24	147,59
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	114,48	114,64	117,02	102,28	87,22
6.a. Barang	114,49	114,59	116,92	102,04	86,83
6.b. Jasa	111,44	123,48	137,56	145,73	152,72
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	122,95	137,52	147,41	106,11	89,18
7.a. Barang	124,28	138,88	147,88	102,15	81,93
7.b. Jasa	108,57	122,22	141,45	152,93	162,35
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(59,95)	(1.203,05)	173,67	97,11	115,09
8.a. Ekspor	128,56	128,13	117,62	127,22	137,53
8.b. Impor	113,91	110,28	109,57	141,61	150,99
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	117,38	118,38	118,27	114,31	115,51

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2012-2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,42	6,52	5,41	6,59	4,21
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,24	8,69	4,69	7,96	7,98
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,37	4,76	2,74	2,17	2,29
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan	3,45	5,97	6,80	6,30	1,39
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,46	5,88	7,54	5,39	0,72
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,54	4,14	4,83	5,11	2,52
1.f. Hotel dan Restoran	5,69	10,10	7,77	7,27	2,85
1.g. Lainnya	9,76	(2,33)	0,96	3,47	1,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,87	8,08	6,73	8,66	3,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	7,45	6,53	15,79	15,60	6,96
3.a. Konsumsi Kolektif	6,22	7,57	19,51	15,67	5,62
3.b. Konsumsi Individu	10,02	4,37	7,96	12,43	11,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	7,31	2,14	3,46	5,80	6,71
4.a. Bangunan	8,70	4,98	5,51	5,36	4,42
4.b. Non-Bangunan	5,47	(2,16)	(0,07)	6,89	10,39
5. Perubahan Inventori	(23,91)	46,01	(3,04)	(27,07)	(4,31)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(5,08)	0,14	2,08	(12,59)	(14,72)
6.a. Barang	(5,13)	0,08	2,03	(12,73)	(14,90)
6.b. Jasa	6,42	10,81	11,41	5,93	4,80
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	6,50	11,85	7,19	(28,02)	(15,96)
7.a. Barang	6,12	11,74	6,49	(30,92)	(19,79)
7.b. Jasa	9,55	12,58	15,73	8,11	6,17
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(153,47)	1.906,69	(114,44)	(44,08)	18,51
8.a. Ekspor	16,43	(0,33)	(8,21)	8,17	8,10
8.b. Impor	2,89	(3,19)	(0,65)	29,24	6,63
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1,15	0,85	(0,09)	(3,35)	1,05

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2015*, Jakarta, 2016.
13. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
14. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
15. International Monetary Fund, *World Economic Outlook*, Washington DC., 2015.
16. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
17. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
18. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
19. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

20. _____ , *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50*, New York, 1988.
21. _____ , *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76*, New York, 2000.
22. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
23. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
24. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

<http://kaltim.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kemakmuran No. 4 Samarinda 75117
Telp.: (0541) 732793, 743372 Faks.: (0541) 201121
e-mail: neraca6400@bps.go.id http: kaltim.bps.go.id

